



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 107/PMK.07/2018  
TENTANG

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:
  - a. pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah;
  - b. penilaian atas usulan pinjaman daerah;
  - c. penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; dan/atau
  - d. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah terdiri atas:
  - a. Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
  - b. Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

## BAB III

### PENYUSUNAN PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
  - b. tahap II, penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi.
- (2) Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan
  - b. tahap II, penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 4

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$KFD_{provinsi} = \frac{\text{pendapatan}}{\text{[pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu]}}$$

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total pendapatan pada realisasi APBD provinsi Tahun Anggaran 2016.
- (3) Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pajak Rokok;
  - b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - c. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi;
  - d. Dana Alokasi Khusus Fisik;
  - e. Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
  - f. Dana Otonomi Khusus;
  - g. Dana Tambahan Infrastruktur; dan
  - h. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (4) Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak termasuk Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (5) Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Bunga;
  - c. Belanja Hibah untuk Daerah Otonom Baru; dan
  - d. Belanja Bagi Hasil.

#### Pasal 5

- (1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dihitung dengan cara membagi Kapasitas Fiskal Daerah provinsi tersebut dengan rata-rata Kapasitas Fiskal Daerah seluruh daerah provinsi.
- (2) Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah provinsi dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$IKFD < 0,351$	sangat rendah
$0,351 \leq IKFD < 0,530$	rendah
$0,530 \leq IKFD < 0,823$	sedang
$0,823 \leq IKFD < 1,531$	tinggi
$IKFD \geq 1,531$	sangat tinggi

#### Pasal 6

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$KFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{\text{pendapatan} - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu}]}{\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan}}$$

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total pendapatan pada realisasi APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016.
- (3) Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok;
  - b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - c. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi;
  - d. Dana Alokasi Khusus Fisik;
  - e. Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
  - f. Dana Otonomi Khusus; dan
  - g. Dana Desa.
- (4) Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak termasuk Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (5) Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Bunga;
  - c. Belanja Hibah untuk Daerah Otonom Baru;
  - d. Belanja Bagi Hasil; dan
  - e. Alokasi Dana Desa.

#### Pasal 7

- (1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung dengan cara membagi Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota tersebut dengan rata-rata Kapasitas Fiskal Daerah seluruh kabupaten/kota.
- (2) Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
IKFD < 0,548	sangat rendah
0,548 ≤ IKFD < 0,770	rendah
0,770 ≤ IKFD < 1,137	sedang
1,137 ≤ IKFD < 2,021	tinggi
IKFD ≥ 2,021	sangat tinggi

#### Pasal 8

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 menggunakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 dan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2016.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1202) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

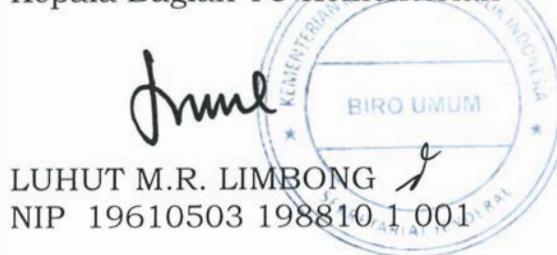
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1210

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 107/PMK.07/2018  
TENTANG  
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

A. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH PROVINSI

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
1	Prov. Aceh	0,569	Sedang
2	Prov. Sumatera Utara	0,892	Tinggi
3	Prov. Sumatera Barat	0,563	Sedang
4	Prov. Riau	0,841	Tinggi
5	Prov. Jambi	0,446	Rendah
6	Prov. Sumatera Selatan	1,117	Tinggi
7	Prov. Bengkulu	0,300	Sangat Rendah
8	Prov. Lampung	0,542	Sedang
9	Prov. DKI Jakarta	9,250	Sangat Tinggi
10	Prov. Jawa Barat	3,150	Sangat Tinggi
11	Prov. Jawa Tengah	2,034	Sangat Tinggi
12	Prov. DI Yogyakarta	0,382	Rendah
13	Prov. Jawa Timur	3,036	Sangat Tinggi
14	Prov. Kalimantan Barat	0,518	Rendah
15	Prov. Kalimantan Tengah	0,464	Rendah
16	Prov. Kalimantan Selatan	0,724	Sedang
17	Prov. Kalimantan Timur	1,303	Tinggi
18	Prov. Sulawesi Utara	0,337	Sangat Rendah
19	Prov. Sulawesi Tengah	0,357	Rendah
20	Prov. Sulawesi Selatan	0,696	Sedang
21	Prov. Sulawesi Tenggara	0,322	Sangat Rendah
22	Prov. Bali	0,702	Sedang
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	0,478	Rendah
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	0,397	Rendah
25	Prov. Maluku	0,325	Sangat Rendah
26	Prov. Papua	0,770	Sedang
27	Prov. Maluku Utara	0,295	Sangat Rendah
28	Prov. Banten	1,103	Tinggi
29	Prov. Bangka Belitung	0,228	Sangat Rendah
30	Prov. Gorontalo	0,221	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
31	Prov. Kepulauan Riau	0,349	Sangat Rendah
32	Prov. Papua Barat	0,631	Sedang
33	Prov. Sulawesi Barat	0,246	Sangat Rendah
34	Prov. Kalimantan Utara	0,414	Rendah

B. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
1	Kab. Aceh Barat	0,951	Sedang
2	Kab. Aceh Besar	0,724	Rendah
3	Kab. Aceh Selatan	0,359	Sangat Rendah
4	Kab. Aceh Singkil	0,358	Sangat Rendah
5	Kab. Aceh Tengah	0,886	Sedang
6	Kab. Aceh Tenggara	0,036	Sangat Rendah
7	Kab. Aceh Timur	0,966	Sedang
8	Kab. Aceh Utara	1,372	Tinggi
9	Kab. Bireuen	0,815	Sedang
10	Kab. Pidie	1,000	Sedang
11	Kab. Simeulue	0,613	Rendah
12	Kota Banda Aceh	0,985	Sedang
13	Kota Sabang	0,392	Sangat Rendah
14	Kota Langsa	0,601	Rendah
15	Kota Lhokseumawe	0,536	Sangat Rendah
16	Kab. Gayo Lues	0,682	Rendah
17	Kab. Aceh Barat Daya	0,247	Sangat Rendah
18	Kab. Aceh Jaya	0,498	Sangat Rendah
19	Kab. Nagan Raya	0,820	Sedang
20	Kab. Aceh Tamiang	0,861	Sedang
21	Kab. Bener Meriah	0,670	Rendah
22	Kab. Pidie Jaya	0,568	Rendah
23	Kota Subulussalam	0,666	Rendah
24	Kab. Asahan	1,027	Sedang
25	Kab. Dairi	0,667	Rendah
26	Kab. Deli Serdang	1,852	Tinggi
27	Kab. Karo	0,793	Sedang
28	Kab. Labuhanbatu	0,732	Rendah
29	Kab. Langkat	1,272	Tinggi
30	Kab. Mandailing Natal	0,769	Rendah
31	Kab. Nias	0,498	Sangat Rendah
32	Kab. Simalungun	0,797	Sedang
33	Kab. Tapanuli Selatan	0,685	Rendah
34	Kab. Tapanuli Tengah	0,498	Sangat Rendah
35	Kab. Tapanuli Utara	0,474	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
36	Kab. Toba Samosir	0,444	Sangat Rendah
37	Kota Binjai	0,822	Sedang
38	Kota Medan	3,626	Sangat Tinggi
39	Kota Pematang Siantar	0,874	Sedang
40	Kota Sibolga	0,487	Sangat Rendah
41	Kota Tanjung Balai	0,496	Sangat Rendah
42	Kota Tebing Tinggi	0,579	Rendah
43	Kota Padang Sidempuan	0,427	Sangat Rendah
44	Kab. Pakpak Bharat	0,392	Sangat Rendah
45	Kab. Nias Selatan	0,590	Rendah
46	Kab. Humbang Hasundutan	0,504	Sangat Rendah
47	Kab. Serdang Bedagai	0,695	Rendah
48	Kab. Samosir	0,527	Sangat Rendah
49	Kab. Batu Bara	0,645	Rendah
50	Kab. Padang Lawas	0,680	Rendah
51	Kab. Padang Lawas Utara	0,637	Rendah
52	Kab. Labuhanbatu Selatan	0,688	Rendah
53	Kab. Labuhanbatu Utara	0,703	Rendah
54	Kab. Nias Utara	0,465	Sangat Rendah
55	Kab. Nias Barat	0,379	Sangat Rendah
56	Kota Gunungsitoli	0,445	Sangat Rendah
57	Kab. Limapuluh Kota	0,531	Sangat Rendah
58	Kab. Agam	0,546	Sangat Rendah
59	Kab. Kepulauan Mentawai	0,419	Sangat Rendah
60	Kab. Padang Pariaman	0,594	Rendah
61	Kab. Pasaman	0,659	Rendah
62	Kab. Pesisir Selatan	0,715	Rendah
63	Kab. Sijunjung	0,322	Sangat Rendah
64	Kab. Solok	0,469	Sangat Rendah
65	Kab. Tanah Datar	0,520	Sangat Rendah
66	Kota Bukittinggi	0,544	Sangat Rendah
67	Kota Padang Panjang	0,519	Sangat Rendah
68	Kota Padang	1,385	Tinggi
69	Kota Payakumbuh	0,493	Sangat Rendah
70	Kota Sawahlunto	0,481	Sangat Rendah
71	Kota Solok	0,529	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
72	Kota Pariaman	0,380	Sangat Rendah
73	Kab. Pasaman Barat	0,777	Sedang
74	Kab. Dharmasraya	0,561	Rendah
75	Kab. Solok Selatan	0,589	Rendah
76	Kab. Bengkalis	2,949	Sangat Tinggi
77	Kab. Indragiri Hilir	1,161	Tinggi
78	Kab. Indragiri Hulu	0,983	Sedang
79	Kab. Kampar	0,990	Sedang
80	Kab. Kuantan Singgingi	0,205	Sangat Rendah
81	Kab. Pelalawan	1,223	Tinggi
82	Kab. Rokan Hilir	0,819	Sedang
83	Kab. Rokan Hulu	0,953	Sedang
84	Kab. Siak	1,091	Sedang
85	Kota Dumai	0,735	Rendah
86	Kota Pekanbaru	2,139	Sangat Tinggi
87	Kab. Kepulauan Meranti	0,877	Sedang
88	Kab. Batanghari	0,416	Sangat Rendah
89	Kab. Bungo	0,548	Rendah
90	Kab. Kerinci	0,540	Sangat Rendah
91	Kab. Merangin	0,320	Sangat Rendah
92	Kab. Muaro Jambi	0,756	Rendah
93	Kab. Sarolangun	0,874	Sedang
94	Kab. Tanjung Jabung Barat	1,102	Sedang
95	Kab. Tanjung Jabung Timur	0,488	Sangat Rendah
96	Kab. Tebo	0,605	Rendah
97	Kota Jambi	1,264	Tinggi
98	Kota Sungai Penuh	0,405	Sangat Rendah
99	Kab. Lahat	1,251	Tinggi
100	Kab. Musi Banyuasin	2,628	Sangat Tinggi
101	Kab. Musi Rawas	1,169	Tinggi
102	Kab. Muara Enim	1,852	Tinggi
103	Kab. Ogan Komering Ilir	1,377	Tinggi
104	Kab. Ogan Komering Ulu	0,789	Sedang
105	Kota Palembang	2,654	Sangat Tinggi
106	Kota Prabumulih	0,785	Sedang
107	Kota Pagar Alam	0,813	Sedang

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
108	Kota Lubuk Linggau	0,707	Rendah
109	Kab. Banyuasin	1,344	Tinggi
110	Kab. Ogan Ilir	0,823	Sedang
111	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	0,739	Rendah
112	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	0,740	Rendah
113	Kab. Empat Lawang	0,592	Rendah
114	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0,885	Sedang
115	Kab. Musi Rawas Utara	0,847	Sedang
116	Kab. Bengkulu Selatan	0,493	Sangat Rendah
117	Kab. Bengkulu Utara	0,573	Rendah
118	Kab. Rejang Lebong	0,455	Sangat Rendah
119	Kota Bengkulu	0,921	Sedang
120	Kab. Kaur	0,575	Rendah
121	Kab. Seluma	0,411	Sangat Rendah
122	Kab. Mukomuko	0,562	Rendah
123	Kab. Lebong	0,398	Sangat Rendah
124	Kab. Kepahiang	0,373	Sangat Rendah
125	Kab. Bengkulu Tengah	0,463	Sangat Rendah
126	Kab. Lampung Barat	0,560	Rendah
127	Kab. Lampung Selatan	0,948	Sedang
128	Kab. Lampung Tengah	0,997	Sedang
129	Kab. Lampung Utara	0,625	Rendah
130	Kab. Lampung Timur	0,317	Sangat Rendah
131	Kab. Tanggamus	0,261	Sangat Rendah
132	Kab. Tulang Bawang	0,706	Rendah
133	Kab. Way Kanan	0,642	Rendah
134	Kota Bandar Lampung	1,637	Tinggi
135	Kota Metro	0,620	Rendah
136	Kab. Pesawaran	0,539	Sangat Rendah
137	Kab. Pringsewu	0,509	Sangat Rendah
138	Kab. Mesuji	0,595	Rendah
139	Kab. Tulang Bawang Barat	0,554	Rendah
140	Kab. Pesisir Barat	0,559	Rendah
141	Kab. Bandung	3,035	Sangat Tinggi
142	Kab. Bekasi	4,524	Sangat Tinggi
143	Kab. Bogor	5,148	Sangat Tinggi

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
144	Kab. Ciamis	1,640	Tinggi
145	Kab. Cianjur	2,174	Sangat Tinggi
146	Kab. Cirebon	1,923	Tinggi
147	Kab. Garut	2,516	Sangat Tinggi
148	Kab. Indramayu	1,534	Tinggi
149	Kab. Karawang	2,663	Sangat Tinggi
150	Kab. Kuningan	1,091	Sedang
151	Kab. Majalengka	1,401	Tinggi
152	Kab. Purwakarta	1,484	Tinggi
153	Kab. Subang	0,865	Sedang
154	Kab. Sukabumi	2,597	Sangat Tinggi
155	Kab. Sumedang	1,355	Tinggi
156	Kab. Tasikmalaya	2,065	Sangat Tinggi
157	Kota Bandung	6,281	Sangat Tinggi
158	Kota Bekasi	4,349	Sangat Tinggi
159	Kota Bogor	2,064	Sangat Tinggi
160	Kota Cirebon	1,159	Tinggi
161	Kota Depok	2,741	Sangat Tinggi
162	Kota Sukabumi	1,106	Sedang
163	Kota Tasikmalaya	1,462	Tinggi
164	Kota Cimahi	1,048	Sedang
165	Kota Banjar	0,640	Rendah
166	Kab. Bandung Barat	1,723	Tinggi
167	Kab. Pangandaran	0,620	Rendah
168	Kab. Banjarnegara	1,054	Sedang
169	Kab. Banyumas	1,939	Tinggi
170	Kab. Batang	0,824	Sedang
171	Kab. Blora	0,982	Sedang
172	Kab. Boyolali	1,037	Sedang
173	Kab. Brebes	1,759	Tinggi
174	Kab. Cilacap	1,470	Tinggi
175	Kab. Demak	1,268	Tinggi
176	Kab. Grobogan	1,567	Tinggi
177	Kab. Jepara	1,575	Tinggi
178	Kab. Karanganyar	1,332	Tinggi
179	Kab. Kebumen	1,382	Tinggi

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
180	Kab. Kendal	1,087	Sedang
181	Kab. Klaten	1,021	Sedang
182	Kab. Kudus	1,196	Tinggi
183	Kab. Magelang	1,200	Tinggi
184	Kab. Pati	1,552	Tinggi
185	Kab. Pekalongan	0,876	Sedang
186	Kab. Pemalang	1,161	Tinggi
187	Kab. Purbalingga	0,954	Sedang
188	Kab. Purworejo	1,095	Sedang
189	Kab. Rembang	0,669	Rendah
190	Kab. Semarang	0,828	Sedang
191	Kab. Sragen	1,194	Tinggi
192	Kab. Sukoharjo	1,153	Tinggi
193	Kab. Tegal	1,186	Tinggi
194	Kab. Temanggung	1,122	Sedang
195	Kab. Wonogiri	0,812	Sedang
196	Kab. Wonosobo	0,966	Sedang
197	Kota Magelang	0,813	Sedang
198	Kota Pekalongan	0,859	Sedang
199	Kota Salatiga	0,839	Sedang
200	Kota Semarang	4,681	Sangat Tinggi
201	Kota Surakarta	1,508	Tinggi
202	Kota Tegal	1,076	Sedang
203	Kab. Bantul	1,236	Tinggi
204	Kab. Gunung Kidul	0,791	Sedang
205	Kab. Kulonprogo	0,762	Rendah
206	Kab. Sleman	1,508	Tinggi
207	Kota Yogyakarta	1,284	Tinggi
208	Kab. Bangkalan	0,697	Rendah
209	Kab. Banyuwangi	2,195	Sangat Tinggi
210	Kab. Blitar	1,396	Tinggi
211	Kab. Bojonegoro	2,277	Sangat Tinggi
212	Kab. Bondowoso	1,459	Tinggi
213	Kab. Gresik	2,130	Sangat Tinggi
214	Kab. Jember	2,073	Sangat Tinggi
215	Kab. Jombang	1,402	Tinggi

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
216	Kab. Kediri	1,442	Tinggi
217	Kab. Lamongan	1,887	Tinggi
218	Kab. Lumajang	1,260	Tinggi
219	Kab. Madiun	0,948	Sedang
220	Kab. Magetan	0,877	Sedang
221	Kab. Malang	2,084	Sangat Tinggi
222	Kab. Mojokerto	1,411	Tinggi
223	Kab. Nganjuk	1,193	Tinggi
224	Kab. Ngawi	1,102	Sedang
225	Kab. Pacitan	0,453	Sangat Rendah
226	Kab. Pamekasan	1,180	Tinggi
227	Kab. Pasuruan	1,841	Tinggi
228	Kab. Ponorogo	0,998	Sedang
229	Kab. Probolinggo	1,336	Tinggi
230	Kab. Sampang	1,197	Tinggi
231	Kab. Sidoarjo	2,681	Sangat Tinggi
232	Kab. Situbondo	0,914	Sedang
233	Kab. Sumenep	1,058	Sedang
234	Kab. Trenggalek	0,978	Sedang
235	Kab. Tuban	1,452	Tinggi
236	Kab. Tulungagung	1,688	Tinggi
237	Kota Blitar	0,839	Sedang
238	Kota Kediri	0,894	Sedang
239	Kota Madiun	0,805	Sedang
240	Kota Malang	1,607	Tinggi
241	Kota Mojokerto	0,824	Sedang
242	Kota Pasuruan	0,669	Rendah
243	Kota Probolinggo	0,825	Sedang
244	Kota Surabaya	8,528	Sangat Tinggi
245	Kota Batu	0,839	Sedang
246	Kab. Bengkayang	0,738	Rendah
247	Kab. Landak	1,274	Tinggi
248	Kab. Kapuas Hulu	1,421	Tinggi
249	Kab. Ketapang	1,381	Tinggi
250	Kab. Mempawah	0,430	Sangat Rendah
251	Kab. Sambas	0,877	Sedang

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
252	Kab. Sanggau	0,855	Sedang
253	Kab. Sintang	1,134	Sedang
254	Kota Pontianak	1,368	Tinggi
255	Kota Singkawang	0,618	Rendah
256	Kab. Sekadau	0,669	Rendah
257	Kab. Melawi	0,776	Sedang
258	Kab. Kayong Utara	0,578	Rendah
259	Kab. Kubu Raya	1,055	Sedang
260	Kab. Barito Selatan	0,710	Rendah
261	Kab. Barito Utara	0,709	Rendah
262	Kab. Kapuas	1,032	Sedang
263	Kab. Kotawaringin Barat	1,056	Sedang
264	Kab. Kotawaringin Timur	1,652	Tinggi
265	Kota Palangka Raya	0,902	Sedang
266	Kab. Katingan	0,925	Sedang
267	Kab. Seruyan	0,920	Sedang
268	Kab. Sukamara	0,629	Rendah
269	Kab. Lamandau	0,681	Rendah
270	Kab. Gunung Mas	0,747	Rendah
271	Kab. Pulang Pisau	0,708	Rendah
272	Kab. Murung Raya	1,045	Sedang
273	Kab. Barito Timur	0,623	Rendah
274	Kab. Banjar	0,982	Sedang
275	Kab. Barito Kuala	0,731	Rendah
276	Kab. Hulu Sungai Selatan	1,057	Sedang
277	Kab. Hulu Sungai Tengah	0,752	Rendah
278	Kab. Hulu Sungai Utara	0,717	Rendah
279	Kab. Kotabaru	1,249	Tinggi
280	Kab. Tabalong	1,452	Tinggi
281	Kab. Tanah Laut	1,182	Tinggi
282	Kab. Tapin	0,720	Rendah
283	Kota Banjarbaru	0,923	Sedang
284	Kota Banjarmasin	1,337	Tinggi
285	Kab. Balangan	1,406	Tinggi
286	Kab. Tanah Bumbu	1,429	Tinggi
287	Kab. Berau	2,210	Sangat Tinggi

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
288	Kab. Kutai Kartanegara	3,417	Sangat Tinggi
289	Kab. Kutai Barat	1,519	Tinggi
290	Kab. Kutai Timur	4,116	Sangat Tinggi
291	Kab. Paser	1,608	Tinggi
292	Kota Balikpapan	2,474	Sangat Tinggi
293	Kota Bontang	1,222	Tinggi
294	Kota Samarinda	2,585	Sangat Tinggi
295	Kab. Penajam Paser Utara	1,285	Tinggi
296	Kab. Mahakam Ulu	1,208	Tinggi
297	Kab. Bolaang Mongondow	0,543	Sangat Rendah
298	Kab. Minahasa	0,664	Rendah
299	Kab. Kepulauan Sangihe	0,110	Sangat Rendah
300	Kota Bitung	0,660	Rendah
301	Kota Manado	1,477	Tinggi
302	Kab. Kepulauan Talaud	0,411	Sangat Rendah
303	Kab. Minahasa Selatan	0,471	Sangat Rendah
304	Kota Tomohon	0,332	Sangat Rendah
305	Kab. Minahasa Utara	0,413	Sangat Rendah
306	Kota Kotamobagu	0,363	Sangat Rendah
307	Kab. Minahasa Tenggara	0,371	Sangat Rendah
308	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0,431	Sangat Rendah
309	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	0,352	Sangat Rendah
310	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0,407	Sangat Rendah
311	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0,370	Sangat Rendah
312	Kab. Banggai	1,079	Sedang
313	Kab. Banggai Kepulauan	0,438	Sangat Rendah
314	Kab. Buol	0,505	Sangat Rendah
315	Kab. Toli-Toli	0,382	Sangat Rendah
316	Kab. Donggala	0,649	Rendah
317	Kab. Morowali	0,644	Rendah
318	Kab. Poso	0,623	Rendah
319	Kota Palu	0,939	Sedang
320	Kab. Parigi Moutong	0,853	Sedang
321	Kab. Tojo Una-una	0,693	Rendah
322	Kab. Sigi	0,577	Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
323	Kab. Banggai Laut	0,503	Sangat Rendah
324	Kab. Morowali Utara	0,706	Rendah
325	Kab. Bantaeng	0,554	Rendah
326	Kab. Barru	0,529	Sangat Rendah
327	Kab. Bone	1,085	Sedang
328	Kab. Bulukumba	0,789	Sedang
329	Kab. Enrekang	0,523	Sangat Rendah
330	Kab. Gowa	0,908	Sedang
331	Kab. Jeneponto	0,646	Rendah
332	Kab. Luwu	0,936	Sedang
333	Kab. Luwu Utara	0,841	Sedang
334	Kab. Maros	0,705	Rendah
335	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0,742	Rendah
336	Kab. Pinrang	0,552	Rendah
337	Kab. Kepulauan Selayar	0,634	Rendah
338	Kab. Sidenreng Rappang	0,585	Rendah
339	Kab. Sinjai	0,539	Sangat Rendah
340	Kab. Soppeng	0,695	Rendah
341	Kab. Takalar	0,540	Sangat Rendah
342	Kab. Tana Toraja	0,686	Rendah
343	Kab. Wajo	0,840	Sedang
344	Kota Parepare	0,683	Rendah
345	Kota Makassar	3,738	Sangat Tinggi
346	Kota Palopo	0,621	Rendah
347	Kab. Luwu Timur	1,414	Tinggi
348	Kab. Toraja Utara	0,515	Sangat Rendah
349	Kab. Buton	0,403	Sangat Rendah
350	Kab. Konawe	0,553	Rendah
351	Kab. Kolaka	0,612	Rendah
352	Kab. Muna	0,342	Sangat Rendah
353	Kota Kendari	0,874	Sedang
354	Kota Bau-Bau	0,663	Rendah
355	Kab. Konawe Selatan	0,030	Sangat Rendah
356	Kab. Bombana	0,253	Sangat Rendah
357	Kab. Wakatobi	0,495	Sangat Rendah
358	Kab. Kolaka Utara	0,517	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
359	Kab. Konawe Utara	0,600	Rendah
360	Kab. Buton Utara	0,509	Sangat Rendah
361	Kab. Kolaka Timur	0,546	Sangat Rendah
362	Kab. Konawe Kepulauan	0,466	Sangat Rendah
363	Kab. Muna Barat	0,476	Sangat Rendah
364	Kab. Buton Tengah	0,464	Sangat Rendah
365	Kab. Buton Selatan	0,455	Sangat Rendah
366	Kab. Badung	5,628	Sangat Tinggi
367	Kab. Bangli	0,556	Rendah
368	Kab. Buleleng	1,473	Tinggi
369	Kab. Gianyar	1,253	Tinggi
370	Kab. Jembrana	0,812	Sedang
371	Kab. Karangasem	0,961	Sedang
372	Kab. Klungkung	0,715	Rendah
373	Kab. Tabanan	1,082	Sedang
374	Kota Denpasar	2,011	Tinggi
375	Kab. Bima	0,095	Sangat Rendah
376	Kab. Dompu	0,551	Rendah
377	Kab. Lombok Barat	0,871	Sedang
378	Kab. Lombok Tengah	0,864	Sedang
379	Kab. Lombok Timur	0,979	Sedang
380	Kab. Sumbawa	0,345	Sangat Rendah
381	Kota Mataram	1,071	Sedang
382	Kota Bima	0,465	Sangat Rendah
383	Kab. Sumbawa Barat	1,361	Tinggi
384	Kab. Lombok Utara	0,589	Rendah
385	Kab. Alor	0,379	Sangat Rendah
386	Kab. Belu	0,521	Sangat Rendah
387	Kab. Ende	0,444	Sangat Rendah
388	Kab. Flores Timur	0,451	Sangat Rendah
389	Kab. Kupang	0,548	Rendah
390	Kab. Lembata	0,386	Sangat Rendah
391	Kab. Manggarai	0,598	Rendah
392	Kab. Ngada	0,439	Sangat Rendah
393	Kab. Sikka	0,477	Sangat Rendah
394	Kab. Sumba Barat	0,394	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
395	Kab. Sumba Timur	0,620	Rendah
396	Kab. Timor Tengah Selatan	0,461	Sangat Rendah
397	Kab. Timor Tengah Utara	0,468	Sangat Rendah
398	Kota Kupang	0,636	Rendah
399	Kab. Rote Ndao	0,457	Sangat Rendah
400	Kab. Manggarai Barat	0,285	Sangat Rendah
401	Kab. Nagekeo	0,423	Sangat Rendah
402	Kab. Sumba Tengah	0,428	Sangat Rendah
403	Kab. Sumba Barat Daya	0,390	Sangat Rendah
404	Kab. Manggarai Timur	0,543	Sangat Rendah
405	Kab. Sabu Raijua	0,404	Sangat Rendah
406	Kab. Malaka	0,340	Sangat Rendah
407	Kab. Maluku Tenggara Barat	0,643	Rendah
408	Kab. Maluku Tengah	0,621	Rendah
409	Kab. Maluku Tenggara	0,450	Sangat Rendah
410	Kab. Buru	0,569	Rendah
411	Kota Ambon	0,503	Sangat Rendah
412	Kab. Seram Bagian Barat	0,555	Rendah
413	Kab. Seram Bagian Timur	0,616	Rendah
414	Kab. Kepulauan Aru	0,769	Rendah
415	Kota Tual	0,442	Sangat Rendah
416	Kab. Maluku Barat Daya	0,781	Sedang
417	Kab. Buru Selatan	0,546	Sangat Rendah
418	Kab. Biak Numfor	0,503	Sangat Rendah
419	Kab. Jayapura	0,866	Sedang
420	Kab. Jayawijaya	0,912	Sedang
421	Kab. Merauke	1,623	Tinggi
422	Kab. Mimika	2,675	Sangat Tinggi
423	Kab. Nabire	0,815	Sedang
424	Kab. Paniai	0,691	Rendah
425	Kab. Puncak Jaya	1,108	Sedang
426	Kab. Kepulauan Yapen	0,665	Rendah
427	Kota Jayapura	0,897	Sedang
428	Kab. Sarmi	1,074	Sedang
429	Kab. Keerom	0,885	Sedang
430	Kab. Yahukimo	0,917	Sedang

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
431	Kab. Pegunungan Bintang	0,995	Sedang
432	Kab. Tolikara	1,116	Sedang
433	Kab. Boven Digoel	1,281	Tinggi
434	Kab. Mappi	1,255	Tinggi
435	Kab. Asmat	1,264	Tinggi
436	Kab. Waropen	0,857	Sedang
437	Kab. Supiori	0,615	Rendah
438	Kab. Mamberamo Raya	1,068	Sedang
439	Kab. Mamberamo Tengah	0,826	Sedang
440	Kab. Yalimo	0,851	Sedang
441	Kab. Lanny Jaya	0,961	Sedang
442	Kab. Nduga	1,119	Sedang
443	Kab. Puncak	1,157	Tinggi
444	Kab. Dogiyai	0,636	Rendah
445	Kab. Intan Jaya	1,021	Sedang
446	Kab. Deiyai	0,356	Sangat Rendah
447	Kab. Halmahera Tengah	0,572	Rendah
448	Kota Ternate	0,742	Rendah
449	Kab. Halmahera Barat	0,446	Sangat Rendah
450	Kab. Halmahera Timur	0,664	Rendah
451	Kab. Halmahera Selatan	0,771	Sedang
452	Kab. Halmahera Utara	0,366	Sangat Rendah
453	Kab. Kepulauan Sula	0,490	Sangat Rendah
454	Kota Tidore Kepulauan	0,582	Rendah
455	Kab. Pulau Morotai	0,376	Sangat Rendah
456	Kab. Pulau Taliabu	0,504	Sangat Rendah
457	Kab. Lebak	1,864	Tinggi
458	Kab. Pandeglang	1,184	Tinggi
459	Kab. Serang	1,796	Tinggi
460	Kab. Tangerang	6,120	Sangat Tinggi
461	Kota Cilegon	1,952	Tinggi
462	Kota Tangerang	3,913	Sangat Tinggi
463	Kota Serang	1,144	Tinggi
464	Kota Tangerang Selatan	3,383	Sangat Tinggi
465	Kab. Bangka	0,780	Sedang
466	Kab. Belitung	0,691	Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
467	Kota Pangkal Pinang	0,642	Rendah
468	Kab. Bangka Selatan	0,506	Sangat Rendah
469	Kab. Bangka Tengah	0,536	Sangat Rendah
470	Kab. Bangka Barat	0,527	Sangat Rendah
471	Kab. Belitung Timur	0,647	Rendah
472	Kab. Boalemo	0,538	Sangat Rendah
473	Kab. Gorontalo	0,623	Rendah
474	Kota Gorontalo	0,650	Rendah
475	Kab. Pohuwato	0,551	Rendah
476	Kab. Bone Bolango	0,108	Sangat Rendah
477	Kab. Gorontalo Utara	0,501	Sangat Rendah
478	Kab. Karimun	0,936	Sedang
479	Kab. Bintan	0,802	Sedang
480	Kab. Natuna	1,109	Sedang
481	Kota Batam	2,743	Sangat Tinggi
482	Kota Tanjung Pinang	0,717	Rendah
483	Kab. Lingga	0,613	Rendah
484	Kab. Kepulauan Anambas	0,858	Sedang
485	Kab. Fakfak	0,836	Sedang
486	Kab. Manokwari	0,585	Rendah
487	Kab. Sorong	0,735	Rendah
488	Kota Sorong	0,647	Rendah
489	Kab. Raja Ampat	0,929	Sedang
490	Kab. Sorong Selatan	0,670	Rendah
491	Kab. Teluk Bintuni	2,055	Sangat Tinggi
492	Kab. Teluk Wondama	0,448	Sangat Rendah
493	Kab. Kaimana	0,844	Sedang
494	Kab. Tambrauw	0,820	Sedang
495	Kab. Maybrat	0,534	Sangat Rendah
496	Kab. Manokwari Selatan	0,566	Rendah
497	Kab. Pegunungan Arfak	0,629	Rendah
498	Kab. Majene	0,343	Sangat Rendah
499	Kab. Mamuju	0,633	Rendah
500	Kab. Polewali Mandar	0,740	Rendah
501	Kab. Mamasa	0,509	Sangat Rendah
502	Kab. Mamuju Utara	0,575	Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
503	Kab. Mamuju Tengah	0,454	Sangat Rendah
504	Kab. Bulungan	0,972	Sedang
505	Kab. Malinau	1,492	Tinggi
506	Kab. Nunukan	0,631	Rendah
507	Kota Tarakan	1,030	Sedang
508	Kab. Tana Tidung	0,680	Rendah

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian

LUHUT M.R. LIMBONG  
NIP 19610503 198810 1 001

